

Concept paper
Situasi terkini Aceh
Achehnese civil society Task Force (ACSTF)

Fase pertama perdamaian Aceh (2005-2010) menunjukkan tingkat keamanan yang lebih stabil, agenda perdamaian seperti penghancuran senjata, penarikan tentara, pelaksanaan pilkada dan pemilu 2009 menghasilkan tatanan politik baru di Aceh, di tambah lagi diaturnya partai politik lokal dalam UU No.11/2006.

Komponen masyarakat sipil juga mulai bertransformasi mengikuti perkembangan baru untuk memperkuat pelaksanaan agenda-agenda pembangunan, karena hal itu berdampak pada penguatan perdamaian.

Memasuki fase kedua perdamaian Aceh (2011-2015), situasi politik dan ekonomi Aceh mengalami ketidakstabilan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa sebab, antara lain; **pertama**, konstruksi politik aktor baru belum memiliki titik kepentingan yang sama terhadap arah pembangunan Aceh. **Kedua**, partai politik lokal belum menjadi solusi atas politik keIndonesiaan yang masih korup dan penuh manipulatif. **Ketiga**, anggaran pembangunan Aceh (APBA) dipergunakan secara tidak optimal untuk memenuhi kebutuhan atas kesejahteraan masyarakat. **Keempat**, permasalahan HAM di masa konflik tidak diselesaikan tetapi melahirkan masalah-masalah yang terakumulasi menjadi benih-benih konflik baru. **Kelima**, Disorientasi kelas menengah Aceh dalam menyikapi berbagai gejolak sosial, ekonomi, politik dan budaya yang berkembang saat ini. **Keenam**, penegakan hukum tidak berjalan maksimal, hukum cenderung diskriminatif (termasuk syariah islam). **Ketujuh**, tata pemerintahan mengalami mismanajemen sehingga beberapa kabupaten/kota menjadi defisit anggaran (bangkrut). **Kedelapan**, dunia usaha bergantung pada anggaran pemerintahan, sehingga di saat APBA macet maka aktifitas ekonomi dalam skala besar juga ikut imbasnya. **Kesembilan**, intervensi pemerintah lemah dalam mengontrol pasar sehingga masyarakat produksi mengalami kerugian, sektor ril berkembang dengan sendirinya. **Kesepuluh**, eksploitasi tambang yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah malah berdampak menghancurkan kapital masyarakat. Selain itu, pengembangan sumber daya alam belum diarahkan secara terpadu untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan jangka panjang. **Kesebelas**, komunikasi politik Aceh-Jakarta belum mempertemukan ketersinggungan politik yang konstruktif, bahkan cenderung destruktif. **Keduabelas**, toleransi sosial dalam rekonstruksi gagasan mengalami stagnasi, bahkan antar kelompok yang berbeda melahirkan perbedaan yang tajam dan tidak konstruktif.

Gambaran situasi diatas mengakibatkan situasi keamanan di Aceh semakin memperlihatkan praktek-praktek kriminalitas, persaingan politik yang negatif, diskriminasi sosial, dan bahkan fenomena keagamaan yang intoleran.

Beberapa peristiwa keamanan dalam tiga bulan terakhir, antara lain : pembakaran villa gubernur, pengrusakan kantor Partai Aceh di Bireun, penggranatan rumah ketua KPA Sabang, penggranatan kantor PU Bireun, penembakan rumah warga di Bireun,

perkelahian anggota DPRK Banda Aceh, merupakan imbas daripada *ketidakadilan pembangunan dan konstruksi politik yang destruktif*.

Perkembangan keamanan, tradisi politik dan birokrasi yang lemah dalam merespon berbagai fenomena sosial, ekonomi, politik dan budaya akan berhadapan dengan agenda demokrasi di penghujung tahun 2011, yaitu pilkada di tingkat propinsi dan 18 kabupaten/kota. Oleh karena itu, masa yang tersisa menjelang pilkada tersebut perlu dicermati secara konstruktif oleh semua institusi dan aktor politik untuk mempertemukan kepentingan politiknya pada agenda pembangunan kesejahteraan masyarakat. Maka, pilkada merupakan momentum politik yang paling penting untuk menumbuhkan strategi bersama dalam merekonstruksi pembangunan Aceh kedepan.

Perdebatan pilkada dilaksanakan tepat waktu dan direncanakan penundaan mesti dibangun secara realistis dan memiliki komitmen demi kepentingan besar dalam mendukung rekonstruksi politik, ekonomi, sosial dan budaya yang sebagaimana kita ketahui dan pahami bersama mengalami pergeseran selama fase pertama perdamaian (2005-2010). Oleh karena itu, awal fase kedua perdamaian (2011-2015) semua kekuatan politik di Aceh mesti membangun kesadaran politik bersama untuk melakukan agenda strategis bersama, sehingga pilkada tidak hanya berlangsung sebagai agenda rutinitas demokrasi semata, melainkan dapat menjadi agenda refleksi sikap politik setiap individu dan institusi, konstruksi gagasan politik, negosiasi-negosiasi politik, dan mempertemukan agenda strategis politik bersama.